BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pelaporan informasi keuangan oleh pemerintah daerah merupakan topik yang masih hangat di kalangan peneleliti. Banyak peneliti yang telah meneliti terkait topik ini namun dengan sampel penelitian yang menggunakan perusahaan swasta dan masih sedikit yang menggunakan sektor publik sabagai sampelnya. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Yustina Hiola (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan pada *website* , serta moderasi opini audit dan lingkungan politik terhadap pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan pada *website* . Penelitian ini menggunakan variabel independen kinerja keuangan yang terdiri dari 3 indikator yakni penyerapan belanja daerah (PBD), rasio efektivitas dan rasio kemandirian. Untuk variabel dependen penelitian ini menggunakan IFR sedangakan untuk variabelmoderasi penelitian ini menggunakan lingkungan politik dan opini audit dengan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan teknik pemilihan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria memiliki *website* dan dapat diakses, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2013 tersedia, LKPD dalam format

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), serta menyediakan data penelitian secara lengkap untuk seluruh variabel. Sampel akhir penelitian ini adalah 48 Pemda. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website* Pemda, artinya kinerja keuangan yang baik dapat mendorong pemerintah daerah melakukan pengungkapan informasi keuangan di *website* resminya. Penelitian ini juga menemukan bahwa opini audit dapat mendorong kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website* . Selain itu hasil penelitian ini juga menemukan bahwa lingkungan politik tidak berhasil memoderasi pengaruh kinerja keuangan Pemda terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website* .

Persamaan:

1. Menggunakan grand teori yang sama yaitu Teori Legitimasi
2. Sampel penelitian menggunakan pemerintah daerah.

Perbedaan:

1. Penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan variabel moderasi dalam penelitiannnya.
2. Pada penelitian ini teknik penelitian yang digunakan adalah PLS sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan analisis deskriptif.

2. Ghaniyyu Mintotik Waliyyani (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah daerah

(LKPD). Variabel independen penelitian ini adalah *size*, umur pemerintah daerah, temuan audit, *leverage*, intergovernmental *revenue*. Sedangkan variabel depemden menggunakantingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel penelitian berupa pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Teknik analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa secara parsial variabel umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan variabel *size*, temuan audit, *leverage*, dan intergovernmental *revenue* tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Persamaan:

1. Data diperoleh dari website pemerintah daerah.
2. Sampel penelitian menggunakan Pemda.

Perbedaan:

1. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan analisis deskriptif sedangkan penelitian ini menggunakan analisis linier berganda
2. Tujuan penelitian ini mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah terhadap tingkat pengungkapan sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk menganalisis penyajian informasi keuangan Pemda.

3. Dwi Martani *et al.* (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengungkapan informasi non keuangan pada *website* pemda di Indonesia dan menguji apakah tingkat pendidikan , kekayaan, ukuran dan kemandirian finacial mempengaruhi

pengungkapan informasi non-keuangan di Pemda. Penelitian ini menggunakan informasi non keuangan sebagai variabel dependen dan tingkat pendidikan , kekayaan, ukuran dan kemandirian finacial sebagai variabel independen. Dengan menggunakan statistik deskriptif hasil penelitian ini menunjukan hanya 10% yang mengungkapkan informasi tentang pemberdayaan masyarakat dan 50% yang mengungkapkan informasi daerah geografis, potensi daerah dan daya tarik pariwisata. Sedangkan untuk menguji pengaruh variabel independennya peneliti menggunakan alat uji regresi liner berganda. Hasil penelitian menunjukanbahwa tingkat pendidikan, kekayaan dan ukuran secara signifikan mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi non-keuangan.

Persamaan:

1. Sampel penelitian menggunakan pemerintah daerah.
2. Menganalisis penyajian informasi pada *website* daerah.

Perbedaan:

1. Penelitian ini menganalisis perbedaan penyajian informasi non-keuangan sedangkan penelutian yang akan dilakukan menganalisis penyajian informasi keuangan.
2. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda karana ada variabel independentnya yang akan diuji pengaruhnya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya menggunakan analisis deskriptif.

4. Dwi Martani (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 dengan fokus pada

transparansi keuangan dan informasi kinerja serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat transparansi keuangan dan informasi kinerja di situs pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan variabel transparasi keuangan sebagai variabel dependennya sedangkan ukuran, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah digunakan sebagai variabel independennya. Dengan mengunakan analisis deskriptif hasil penelitian menunjukan Ada 429 dari total 491 *website* pemerintah berhasil diakses dan dianalisis lebih lanjut. Sedangkan tingkat transparansi informasi keuangan dan kinerja pemerintah mencapai 15%. Informasi yang paling sering diungkapkan terkait dengan informasi keuangan dan kinerja pemerintah daerahmasih dalam bentuk berita. Sedangkan pengungkapan informasi keuangan utama dan informasi kinerja yang dalam bentukapbd, laporan keuangan, dan laporan kinerja masih di bawah 10%. Untuk menguji pengaruh, peneliti menggunakan regresi linier berganda dengan hasil yang menunjukan bahwa ukuran, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah memiliki pengaruh positif pada tingkat transparansi informasi keuangan dan kinerja APBD, laporan keuangan, dan laporan kinerja masih di bawah 10%.

Persamaan:

1. Sampel yang digunakan menggunakan pemerintah daerah.
2. Menganalisis informasi keuangan yang disajikan oleh *website* daerah

Perbedaan:

1. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda urntuk menguji pengaruh variabel independennya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya menggunakan statistik deskriptif.
2. Penelitian ini menggunakan variabel independen untuk menguji pengaruh terhadap penyajian informasi keuangan, sedangakan penelitian yanga akan dilakukan hanya menganalisis penyajian informasi keuangan saja sehingga tidak membutuhkan variabel independent.

5. Botti *et al.* (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang peran dewan direksi dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui internet(IFR). Teknik analisis data yang digunakan adalahanalisis data *envelopment* (DEA). Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 32 perusahaan Perancis yang memiliki indeks CAC40 pada Desember 2007. Pengukuran kualitas IFR menggunakan *IFR Content* dan *IFR presentation*. Konten merupakan informasi utama danumum disajikan pada *website* . Sedangkan *ifrpresentation* terdiri dari tiga kategori yaitu: eksistensi teknologi, kenyamanan , dan ketepatan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 28 persen dari perusahaan sampel yang ada terletak padabatas efisiensi untuk semua komponen IFR. Petinggi perusahaan dan dewan direksi bertindak memonitor dengan efektif dari manajemen puncak, dengan meningkatkan kualitas pengungkapan kebijakan perusahaan melalui peningkatan tingkat IFR. Di bawah kendali dewan direksi, situs *web* perusahaan menjadi berkembang dan mudah diakses oleh

penggunadalam mengungkapkan informasi yang diperlukan oleh berbagai pemangku kepentingan. Hasil empiris juga menunjukkan bahwa 46,9 persen dari perusahaan sampel berada di luar batas efisiensi untuk semua langkah IFR, yang menunjukkan bahwa tidak adanya efisiensi dalam komposisi, struktur, atau fungsi dewan direksi. Tidak efisiensi dalam pemantauan dan pengawasan manajemen puncak dengan dewan direksi memungkinkan tingkat kualitas IFR yang lebih rendah dari hampir sebagian dari perusahaan CAC40 pada tahun 2007.

Persamaan:

1. Menggunakan teori agensi sebagai *grand theory*.
2. Indeks yang digunakan untuk mengukur IFR sama yaitu: *content, timeliness, technology used,* dan *web user support*

Perbedaan:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang peran dewan direksi dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui internet (IFR), sedangkan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyajian informasi keuangan Pemda di Indonesia.
2. Sampel penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan swasta di Perancis yang memiliki indeks CAC40 pada Desember 2007, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel Pemda di Indonesia.

6. Ratmono Dwi (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa intensif pemerintah daerah di Indonesia menggunakan *website* untuk menyajikan informasi keuangan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas. Penelitian ini

menganalisis ketersediaan dana keteraksesan prektek pelaporan keuangan melaui internet yang dilakukan pemerintah daerah di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah pemerintah daerah di Indonesia, sedangkan teknik analisisnya menggunakan Uji Chi-Square dan ordunari logistic regression dengan hasil yang menunjukan bahwa tingkat ketersediaan Laporan Realisasi Anggaran(LRA) lebih tinggi dibandingkan laporan keuangan Pemda lengkap. Besarnya alokasi anggaean dan ketergantungan financial merupakan diterminan praktek pelaporan keuangan internet pemerintah daerah.

Persamaan:

1. Sampel penelitian berupa pemerintah daerah
2. Teknik pengumpulan data menggunakan *total sampling*

Perbedaan:

1. Teknik analisis yang akan digunakan penelitian ini menggunakan ordanary logistic regression sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya menggunakan analisis deskriptif .
2. Penelitian ini meneliti tingkat keteraksesan dan ketersediaan konten IFR sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang penyajian informasi keuangan pada website Pemda.

7. Maya Dewi Trisnawati (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang efek dari persaingan politik, ukuran pemerintah daerah, *leverage*, kekayaan pemerintah daerah, jenis pemerintah daerah, dan opini audit atas publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. Populasi

penelitian ini adalah pemerintah daerah di Indonesia pada tahun 2012. Penelitian ini menggunakan 210 pemerintah daerah di Indonesia yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling.

Alat uji penelitian menggunakan *uji chi-square* dan *ordinary logistc regression* dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, *leverage*, dan kekayaan pemerintah daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. Penelitian ini gagal membuktikan pengaruh jenis pemerintah daerah dan opini audit atas publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. Program internet masuk desa membuat peningkatan penggunaan internet di kabupaten tersebut. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah kota dan kabupaten tidak berbeda untuk mempublikasikan laporan keuangan melalui internet. Pendapat wajar tanpa pengecualian tidak selalu menunjukkan sinyal yang baik dari manajemen keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, opini audit lainnya tidak langsung menunjukkan bahwa sinyal dari manajemen keuangan pemerintah daerah adalah buruk.

Persamaan

1. Menggunakan teori agensi dan signaling sebagai *grand theory*
2. Sampel penelitian menggunakan pemerintah daerah

Perbedaan:

1. Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada teknik penentuan sampel, jika penelituan ini menggunakan tekhnik purposive

sampling maka penelitian yang akan dingguakan mengunakan teknik total sampling.

2. Penelitian ini menggunakan *uji chi-square* dan *ordinary logistc regression* sebagai alat uji penelitian sedangakan penelitian yang akan dilakukan menggukan alat uji statistik deskriptif.

8. Djoko Suhardjanto (2010)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan enam variabel independen yaitu ukuran pemerintah daerah, kewajiban, pendapatan transfer, umur pemerintah daerah, satuan kerja perangkat daerah, kemandirian keuangan daerah, serta variabel dependennya adalah tingkat kepatuhan pengungkapan laporan keuangan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Laporan keuangan pemerintah daerah yang berhasil diunduh dari situs BPK sebanyak 439 laporan. Dari 439 laporan keuangan pemerintah daerah, 32 merupakan laporan keuangan pemerintah provinsi dan 407 merupakan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota. Dari 407 laporan keuangan pemerintah kabupaten kota terdiri dari 159 laporan keuangan yang memiliki hasil audit BPK berupa opini tidak wajar dan tidak memberikan pendapat, 248 laporan keuangan yang memiliki hasil audit BPK berupa opini wajar tanpa pengecualian dan wajar dengan pengecualian. Dari 248 laporan keuangan, yang memberikan data yang lengkap untuk penelitian ini adalah sebanyak 79 laporan keuangan. Teknik analisis regresi berganda digunakan sebagai teknik analisis utama dalam penelitian ini dengan hasil yag menunjukan

Praktik pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan di Indonesia masih sangat rendah. Rerata tingkat kepatuhan pengungkapanlaporan keuangansebesar 22%, dengan nilai tertinggi sebesar 39% dan terendah sebesar 13%.

Alat uji analisis utama yang digunakan adalah regresi berganda hasil pengujian menunjukkan bahwa dua variabel karakteristik pemerintah daerah secara positif mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan LKPD, yaitu variabel Umur Pemerintah daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah. Umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan LKPD menunjukkan bahwa semakin banyak umur pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap semakin luasnya tingkat pengungkapan laporan keuangan. Pengalaman dalam hal administrasi keuangan pemerintah daerah yang lebih tua dimungkinkan sebagai faktor penyebab adanya pengaruh tersebut. Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap semakin luasnya tingkat pengungkapan laporan keuangan. Hal ini dimungkinkan tuntutan akuntabilitas publik mewajibkan pemerintah daerah mempertanggungjawabkan sumber daya yang telah digunakannya kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah.

Persamaan:

1. Menganalisis pengungkapan informasi keuangan oleh pemda.
2. Sampel penelitian menggunakan pemerintah daerah

Perbedaan:

1. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan analisi deskriptif.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib laporan keuanganoleh pemerintah daerah sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk menganalisis penyajian informasi keuangan pada website pemda yang masih bersifat sukarela.

9. Garcia (2010)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pelaporan informasi keuangan secara sukarela di pemerintah daerah Spanyol di Internet .Peneliti menggunakan lima variabel, dengan vaariabel dependen IFR sedangakan variabel independennya adalah ukuran pemerintah daerah , *leverage*, investasi modal , persaingan politik dan visibilitas pers. Dari otoritas lokal. Dengan menggukanan analisis regresi berganda hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran , investasi modal dan persaingan politik memiliki hubungan positif signifikan dengan tingkat pengungkapan sukarela pada *website* daerah . Peneliti menemukan hubungan negatif signifikan antara visibilitas pers dan pengungkapan keuangan sukarela.

Persaamaan:

1. Menganalisis pelaporan keuangan oleh pemda yang masih bersifat sukarela.
2. Sampel penelitian menggunakan pemerintah daerah.

Perbedaan:

1. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif.

10. Luciana Spica Almilia (2009)

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kualitas IFR perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta. Peneliti menggunakan IFR sebagai variabel dependennya, Indeks IFR diukur dengan *content, timeliness, technologi used* dan *web user support*sedangkan untuk variabel dependentnya peneliti menggunakan *size, laverage,* ROA, dan ROE. Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor perbankan dan perusahaan yang tergabung dalam kelompok saham LQ-45. Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda sebagaai alat uji utama peneliti menemukan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sifat pengungkapan IFR bervariasi di seluruh sampel perusahaan. Ukuran perusahaan dan ROE diidentifikasi sebagai penentu faktor IFR di Indonesia.

Persamaan:

1. Topik yang digunakan terkait dengan IFR
2. Indeks yang digunakan untuk mengukur IFR sama yaitu: *content, timeliness, technology used,* dan *web user support*

Perbedaan:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor faktor yang mempengaruhi IFR di Indonesia sedangkan penelitian yang akan dilakukan

bertujuan untuk menganalisis penyajian informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah

2. Sampel penelitian pada penelitian ini menggunakan perusahaan yang *listed* di bursa efek sedangakan penelitian yang akan dilakukan mengunakan pemerintah daerah

2.2 Landasan teori

2.2.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkesinambungan mencari cara untuk meyakinkan bahwa organisasi tersebut beroperasi dalam batasan-batasan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, dengan begitu organisasi tersebut berusaha meyakinkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dipedulikan oleh pihak-pihak luar (Deegan, 2002). Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Suchman, 1995 dalam Kirana, 2009). O'Donovan (2002) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah individu dan kelompok masyarakat

Menurut Deegan (2000), teori legitimasi meyakini suatu gagasan bahwa terdapat ”kontrak sosial” antara organisasi dengan lingkungan tempat organisasi beroperasi. Konsep ”kontrak sosial” digunakan untuk menunjukkan harapan masyarakat tentang cara yang seharusnya dilakukan organisasi dalam melakukan aktivitas. Harapan masyarakat terhadap perilaku perusahaan dapat bersifat implisit dan eksplisit. Deegan (2000) menyatakan bahwa, bentuk eksplisit dari kontrak sosial adalah persyaratan legal, sementara bentuk implisitnya adalah harapan masyarakat yang tidak tercantum dalam peraturan legal. Organisasi akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menganjurkan organisasi untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerja organisasi tersebut dapat diterima oleh masyarakat.

Demikian halnya dengan pemerintahan daerah. Dewasa ini, seiring adanya jaminan akan demokrasi pasca reformasi, masyarakat menjadi semakin kritis dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Keterbukaan informasi merupakan salah satu hal yang menjadi fokus perhatian masyarakat. Semangat reformasi di bidang keuangan dan reformasi berbagai aspek di berbagai lingkungan telah mendorong kepercayaan diri masyarakat untuk turut serta mengawasi kinerja pemerintah khususnya dalam pola pengelolaan keuangan. Bentuk perubahan tersebut antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam mengelola keuangan. Dampaknya, suatu pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel sudah menjadi harapan masyarakat secara umum. Seiring harapan masyarakat

yang berubah, pemerintah daerah juga harus dapat beradaptasi dan berubah. Pemerintah daerah dikatakan efektif apabila dapat bereaksi dengan cepat terhadap perubahan yang menjadi perhatian (Deegan, 2000)

Teori legitimasi dalam kaitannya dengan pemerintahan berfokus pada interaksi antara Pemerintah daerah dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat. Jika kesesuaian dengan norma sosial itu tercapai maka dapat membuat Pemerintah daerah semakin legitimate yang artinya masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Menurut Dowling dan Pfeffer dalam Ghozali dan Chariri (2007), legitimasii merupakan hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, serta reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa hal yang mendasari teori legitimasi adalah kontrak sosial antara Pemerintah daerah dengan masyarakat dimana Pemerintah daerah beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Shocker dan Sethi dalam Ghozali dan Chariri (2007) memberikan penjelasan tentang konsep kontrak sosial, yaitu: “semua institusi sosial tidak terkecuali Pemerintah daerah beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial, baik eksplisit maupun implisit, dimana kelangsungan hidup pertumbuhannya didasarkan pada hasil akhir yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas dan distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki. Deegan,

Robin dan Tobin (2002) menyatakan bahwa legitimasi Pemerintah daerah akan diperoleh, jika terdapat kesamaan antara hasil dengan yang diharapkan oleh masyarakat dari Pemerintah daerah, sehingga tidak ada tuntuntan dari masyarakat. Pemerintah daerah dapat melakukan pengorbanan sosial sebagai refleksi dari perhatian Pemerintah daerah terhadap masyarakat.

Teori legitimasi menjadi landasan bagi Pemerintah daerah untuk memperhatikan apa yang menjadi harapan masyarakat dan mampu menyelaraskan nilai-nilai Pemerintah daerah nya dengan norma-norma sosial yang berlaku di tempat Pemerintah daerah tersebut melangsungkan kegiatannya. Pemerintah daerah dapat mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan daerah salah satunya dengan menjadikan masyarakat sebagai pengawas atas semua kegiatan pembangunana oleh Pemerintah daerah . Hal ini dapat terjadi apa bila pemerintah daerah mampu menerapkan konsep transparasi kepada masyarakat dengan memberikan akses penuh pada informasi keuangan .

Dowling dan Pfeffer (1975), ketika ada perbedaan antara nilai-nilai yang dianut Pemerintah daerah dengan nilai-nilai masyarakat, maka Pemerintah daerah akan berada pada posisi terancam. Perbedaan ini dinamakan *Legitimacy Gap* dan dapat mempengaruhi kemampuan Pemerintah daerah untuk melanjutkan kegiatan kepemerinthannya. Pemerintah daerah harus memantau dan mengevaluasi ketika menemukan kemungkinan munculnya *gap* tersebut.

2.2.2 Indeks *Internet Financial Reporting*

Pelaporan Keuangan Internet dikenal sebagai pengungkapan sukarela, bukan karena isi dari pengungkapan melainkan alat yang digunakan. (P.L.Poon,

2003 dalam Licharry et. Al, 2013) definisi IFR adalah penggunaan situs *website* perusahaan untuk menyebarluaskan informasi yang berhubungan dengan kinerja keuangan perusahaan. Pada pendekatan ini, perusahaan menggunakan internet untuk mengenalkan perusahaan mereka kepada pemegang saham dan investor . Terdapat indeks yang digunakan untuk mengukurpelaporan keuangan melalui internet. Botti (2014) menggunakan dua proksi indeks. Dua proksi indeks tersebut adalah *IFR Content* dan *IFR Presentation*. *IFR Content* merupakan informasi utama dan umum yang disajikan dalam *website* , sedangkan *IFR Presentation* merupakan komponen atau unsur pendukung *IFR content* yang terdiri dari eksistensi teknologi, kenyamanan pengguna *(convenience)* dan *timeliness*. Dalam penelitian yang akan dilakukan, indeks yang digunakan untuk mengukur IFR mengalami sedikit perubahan dikarenakan pada penelitian Botti (2014) sampel yang digunakan penelitian bukanlah perusahaan publik seperti yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan, sehingga perlu dimodifikasi agar lebih relevan untuk mengukur IFR pada Pemda. Berikut indeks yang akan digunakan untuk mengukur IFR dalam penelitian ini:

A. *Content*

Content merupakan informasi yang utama dan umum untuk di sajikan kepada pemangku kepentingan, karena sampel penelitian ini menggunakan Pemerintah daerah, maka penyajian konten di *website* Pemda mengacu pada Instruksi Mendagri RI Nomor 188-52/1797/SJ tahun 2012 tentang peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah dan UU KIP no. 14 / 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Konten terdiri dari Ringkasan RKA-

SKPD,Ringkasan RKA-PPKD,Ranperda tentang APBD,Ranperda tentang Perubahan APBD, Perda tentang APBD, Perda tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-PPKD, Laporan Realisasi Anggaran seluruh SKPD, Laporan Realisasi Anggaran PPKD, LKPD yang sudah Audit Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah.

B. *Timeliness*

Timeliness merupakan ketepatan waktu Pemerintah daerah dalam menyapaikan informasinya kepada publik. Informasi harus disampaikan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar didalam pengambilan keputusan–keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Yang dimaksut informasi dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah berita resmi yang dipublikasikan oleh masing-masing *website* daerah.

C. *Technology used*

Technology used merupakan komponen penunjang yang disajikan di dalam *website* daerah, komponen ini terkait dengan pemanfaatan teknologi yang tidak dapat disediakan oleh media laporan cetak serta penggunaan media teknologi multimedia seperti analysis tools dan fitur fitur lanjutan.Teknologi ini akan mempermudah para pengguna untuk mengakses informasi yang ada dalam *website* perusahaan.

D. *User support*

User support merupakan komponen penting yang sebaiknya ada dalam *website* resmi pemerintah daerah. Dengan tersedianya *Web User Support*, dapat membatu pengunjung untuk mencari informasi yang dibutuhkan dengan

lebih efisien. Jika dilihat dari sifat dan tingkat kebutuhannya, terdapat lima macam pendekatan yang dapat digunakan, antara lain seperti berikut jenis-jenis *user support*: *command based methods, context-sensitive help, tutorial help, on-line documentation, intelligent help.*

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan IFR masing-masing *website* pemda berdasarkan content, timeliness, technology used dan *web* user support. Penelitian ini akan memberikan data terkait dengan penerapan *voluntary disclosure* yang sudah diterapkan oleh masing-masing Pemda pada *website* daerahnya. Berikut akan menyajikan kerangka pemikiran yang menjadi pedoman dalam keseluruhan penelitian yang dilakukan:

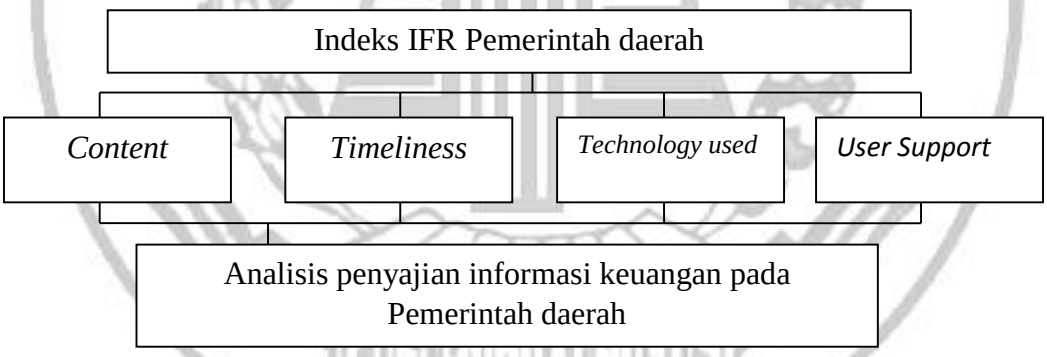

Sumber: Diolah

Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN

Technology used dan *web user support* merupakan komponen penting dalam keteraksesan informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah, peran keduanya sangat krusial ketika pengunjung memilki kemampuan komputasi yang dibawah rata rata. Sehingga diperlukan penerapan *technology used* dan *user*

support yang baik, hal ini akan mempermudah pengunjung untuk mengakses data yang di perlukan. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana penerapan *technology used* dan *web user support*pada *website* daerah yang akan mennjadi sampel dalam penelitian ini.

Konten merupakan informasi keuangan yang terdapat dalam *website* pemerintah daerah yang terdiri dari LKPD (laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahaan ekuitas, laporan arus kas) dan APBD. Kinerja keuangan masing masing pemerintah daerah tentunya memiliki keberagaman . Tentunya pemerintah daerah akan mempublikasikan informasi keuangannya dengan mempertimbangakan kinerja kuangan yang telah dicapainya. Selain itu tingkat kepatuhan dan kedisiplinan masing-masing pemda juga akan mempengaruhi penyajian konten pada masing masing daeerah. Penelitian ani akan mengambarkan bagaima penyajian konten yang sudah di lakukan oleh masing masing Pemda melalui *website* daerahnya.

Timeliness terdiri dari *pers release*, *update* berita, lamanya *update* berita, RKA tahun berjalandan DPA tahun berjalan yang intensitas penyajiannya diyakini akan berbeda beda pada masing masing pemerintah daerah di Indoneseia. Hal ini disebabkan karena intensias penyampaian informasi tersebut dipengaruhi seberapa aktif pemerintah daerah tersebut dalam kegiatan selama kurun waktu satu periode. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana Pemerintah daerah akan menyapaikan informasi-informasi melalui berita yang akan dimuat pada *website* daerahnya.